FOCUS

Mencari Djoko Tjandra

ERWIN ARDIAN
WARTAWAN TRIBUN JATENG

TERPIDANA kasus hak tagih Bank Bali yang telah buron sejak 2009 Djoko Sugiarto Tjandra ternyata bebas berkeliaran di Indonesia. Ini menjadi tamparan keras buat para penegak hukum negeri ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, segera memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menangkap Djoko Tjandra. Sebenarnya perintah itu tak perlu diberikan, karena tanpa diperintah pun, sudah menjadi kewajiban penegak hukum mengeksekusi terpidana.

Namun dalam kasus Djoko Tjandra, perintah itu mungkin dirasa perlu. Menurut Jaksa Agung sendiri, Djoko Tjandra, sudah berada di Indonesia sejak tiga bulan lalu. Mendapatkan informasi seperti itu, Jaksa Agung mengaku sakit hati.

Sakit hati tentu tak hanya milik Jaksa Agung. Hati rakyat yang menyaksikan peristiwa ini lebih sakit. Di tengah tingginya biaya operasional semua lembaga hukum di negeri ini, sudah 11 tahun sebuah negara dibuat tak berdaya oleh seorang Djoko Tjandra.

Bagaimana mungkin buron kasus besar seperti ini bisa luput dari radar intelijen kita. Sekadar mengingatkan, kasus yang menjerat Djoko bukanlah kasus gurem. Djoko yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT EGP terlibat dalam korupsi kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.

Kasus bermula saat Bank Bali kesulitan menagih piutang dengan nilai total Rp3 triliun yang tertanam di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara pada 1997.

Dari Rp 905 miliar yang digelontorkan Bank Indonesia dan BPPN, PT EGP menerima Rp 546 miliar. Sedangkan Bank Bali hanya kebagian Rp 359 miliar. Uang yang diterima EGP inilah yang kemudian jadi masalah.

Setyo Novanto (mantan Ketua DPR RI) yang saat itu sebagai Direksi PT EGP ikut terseret. di mana di sana juga ada nama Setya Novanto dalam jajaran direksinya. Nama besar lainnya adalah Syahril Sabirin (mantan Gubernur BI), dan Pande N Lubis (mantan Wakil Kepala BPPN).

Setelah melarikan diri ke luar negeri, Djoko

Opini

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: **opini.tribun.jateng@gmail.com,** belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto yang memiliki ukuran minimal 250 Kb dan maksimal 2 MB. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

Transformasi Birokrasi di Era Normal Baru

DUNIA sedang sibuk dengan tagar "NormalBaru (#*NewNormal*)" di berbagai aspek kehidupan, termasuk birokrasi *new normal*. Sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) bergiliran bekerja dari rumah (*work from home/WFH*). Dengan adanya pandemi covid-19, WFH dipandang menjadi gaya kerja baruASN. Hal ini sudah diproyeksi oleh guru manajemen anyar, Peter Drucker, dalam Ecological Vision (1993).Dimana rutinitas bekerja di kantor adalah hal usang, dan para pekerja harusnya dapat bekerja fleksibel dimana saja dengan dukungan infrastruktur dan teknologi memadai.

Pendiri Microsoft, Bill Gates, di Economist,23 April 2020 menyebut adanya pandemi ini, maka peneliti medis (*medical researchers*) akan menjadi salah satu profesi yang sangat dibutuhkan ke depan. Sehari kemudian Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), diinstagramnya menyebut pandemi ini menjadi momentum perubahan radikal di Kementerian Keuangan. Selain mendorong efisiensi dan budaya kerja baru melalui pemanfaatan teknologi daring (*online*), transformasi diarahkan kepada jumlah, jenis pekerjaan dan keahlian ASN yang nyata diperlukan.

Meskipun instansional, pernyataan SMI perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengawal birokrasi *new normal* di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Tidak cukup hanya sebatas dalam penerapan WFH, tetapi bagaimana kultur, kebiasaan,dan pola pikir transformatif yang mampu menghilangkan hereditas patogen birokrasi selama ini.

Ujian Seleksi Kompetensi Bidang calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini sebanyak ±150 ribu formasi yang sempat tertunda karena covid-19 perlu dipertimbangkan lagi urgensinya. Sekolah-sekolah kedinasan perlu dikaji efektivitasnya. Pemerintah harus merevaluasi angka riil jumlahASN yang dibutuhkan. Selanjutnya memetakan kembali formasi ASN di era pandemi dan pascacovid-19 yang penuh ketidakpastian. Ujian CPNS selama ini menjadi agenda rutin tahunan yang dinantikan publik. Bahkan menjadi peluang bisnis. Selain buku-buku, kini ada jasa kursus/les bagi yang ingin mengikuti ujian calon ASN. Sejatinya rekrutmen ASN menjadi ajang mengumpulkan talenta terbaik untuk sungguh-sungguh menjadi abdi negara.

BONATAON M.T. VINCENT SIMANDJORANG
PENGELOLAPENELITIANDI LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Semangat birokrasi *new normal* sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat birokrasi gesit (*agile*) dengan memangkas sejumlah pejabat eselon III dan eselon IV-V diganti dengan pengarus utamaan dan perluasan pejabat fungsional teknis yang masih berjumlah 8% dari total ASN. Tentunya dengan menekankan spesialisas iprofesi, keahlian dan kompetensi. Presiden turut melontarkan wacana untuk mengganti ASN dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence)*.

Terkesan kontroversial, namun sesungguhnya visi ini sejalan dengan Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government)* untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, serta menyajikan pelayanan publik berkualitas. Menteri PANRB terdahulu, Yuddy Chrisnandi, pada 2016 sudah mempersiapkan program rasionalisasi jumlah ASN dengan memangkas 1 juta orang jumlah ASN untuk efisiensi anggaran dan meningkatkan kompetensi ASN. Analisis KemenPANRB waktu itu menyebutkan jumlah ideal ASN seharusnya 3,5 juta orang. Namun, agenda ini tidak jelas kelanjutannya.

Jangan sampai birokrasi *new normal* yang digaungkan hanya menjadi tambahan retorika yang tetap membuat citra ASN di mata publik tetap buruk. Sudah triliunan rupiah dihabiskan untuk reformasi birokrasi, namun signifikansi indek sefektivitas pemerintah tahun 2018 oleh World Bank masih di angka59,13 dari skor tertinggi 100, yang "sempurna" dicapai Singapura. Ironi sekali melihat indeks ini belum menjadi indikator sasaran utama dalam bidang reformasi birokrasi di rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2020-2024.

Revaluasi jumlah ASN sangat diperlukan, mengingat ada pemerintah daerah yang lebih dari 75% anggarannya habis untuk belanja gaji dan operasional. Kemampuan fiskal negara semakin memperihatinkan akibat pandemi. Untuk itu pemerintah perlu menyusun petajalan birokrasi ke depan dengan diis ipara abdi negara terbaik, dan berani dengan tegas memangkas para aparatur yang tidak nyata kontribusinya. Tentunya kebijakan revaluasi jumlah ASN beserta skema kompensasi kesejahteraan dan kompensasi rasionalisasi ASN perlu dipercepat. Ada "harga" yang harus dibayar untuk mencapai kesuksesan revolusi mental di birokrasi. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama secara berulang dan mengharapkan hasil yang berbeda seperti pernyataan Albert Einstein.

Revolusi industri ke-4 bukan satusatunya disruptor birokrasi. Covid-19 yang tak kasatmata menjadi faktor"X" meluruskan dan mengembalikan arah reformasi birokrasi ke jalur yang benar. Momentum *new normal* perlu dimanfaatkan dengan adanya inisiatif DPR melakukan revisi UU No. 5/2014 tentang ASN, dan mempersiapkan wajah baru birokrasi di calon ibukota negara yang baru kelak di Bumi Borneo. Tentunya untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, yang sungguh-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. (*)